

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUNAN 2020**



Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palembang, 27 Januari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran

Pakerti Luhur, Ak.MM
NIP 197504151995021001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	4
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	22
B.1 Pendapatan	
B.2 Belanja	
B.3 Belanja Pegawai	
B.4 Belanja Barang	
B.5 Belanja Modal	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	35
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.3 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.4 Persediaan	
C.5 Tanah	
C.6 Peralatan dan Mesin	
C.7 Gedung dan Bangunan	
C.8 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.10 Aset Tak Berwujud	
C.11 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.12 Utang kepada Pihak Ketiga	
C.13 Hibah Yang Belum Disahkan	
C.14 Uang Muka dari KPPN	
C.15 Ekuitas	
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	47
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2 Beban Pegawai	
D.3 Beban Persediaan	
D.4 Beban Barang dan Jasa	
D.5 Beban Pemeliharaan	
D.6 Beban Perjalanan Dinas	
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.8 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.9 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	54
E.1 Ekuitas Awal	
E.2 Surplus (Defisit) LO	
E.3 Transaksi Antar Entitas	
E.4 Ekuitas Akhir	
F. Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	56
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Palembang, 27 Januari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran

Pakerti Luhur, Ak.MM
NIP 197504151995021001

Laporan Keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp222.394.366 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp222.394.366 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp142.614.079.106 atau mencapai 93,94 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp151.816.881.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2020. Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp24.841.556.480 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp11.574.607.415; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp13.134.411.565 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp132.537.500.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.894.462 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp150.375.084.121 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-150.362.189.659, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing masing sebesar Rp-325.966.151 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-150.688.155.810.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp27.029.323.367, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-150.688.155.810 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 148.451.180.729 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp24.792.348.286

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	TA 2020		% thd Angg	TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	222.394.366	-	120.750.000-
JUMLAH PENDAPATAN		-	222.394.366	-	120.750.000
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	14.199.217.000	12.869.313.335	90,63	15.281.435.076
Belanja Barang	B.4	137.554.164.000	129.681.265.771	94,28	224.714.819.907
Belanja Modal	B.5	63.500.000	63.500.000	100,00	2.037.409.000
JUMLAH BELANJA		151.816.881.000	142.614.079.106	93,94	242.033.663.983
SURPLUS/DEFISIT		(151.816.881.000)	(142.391.684.740)		(241.912.913.983)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

II. NERACA**SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	2020	2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1	11.547.107.415	5.501.227.321
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.2	27.500.000	6.275.585.067
Persediaan	C.3	0	823.044.365
Jumlah Aset Lancar		45.662.292.260	12.599.856.753
ASET TETAP			
Tanah	C.4	187.858.000	187.858.000
Peralatan dan Mesin	C.5	10.375.425.300	10.025.776.300
Gedung dan Bangunan	C.6	8.577.169.000	8.577.169.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.7	8.000.000	8.000.000
Akumulasi Penyusutan	C.8	(6.014.040.735)	(4.215.007.799)
Jumlah Aset Tetap		13.134.411.565	14.583.795.501
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.10	242.500.000	242.500.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.11	(109.962.500)	(42.387.500)
Jumlah Aset Lainnya		132.537.500	200.112.500
JUMLAH ASET		24.841.556.480	27.383.764.754
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.12	49.208.194	354.441.387
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		49.208.194	354.441.387
JUMLAH KEWAJIBAN		49.208.194	354.441.387
EKUITAS			
Ekuitas	C.15	24.792.348.286	27.029.323.367
JUMLAH EKUTAS		24.792.348.286	27.029.323.367
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		24.841.556.480	27.383.764.754

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

III. LAPORAN OPERASIONAL

**SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020
DAN 2019**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2020	2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	12.894.462	7.330.690
Jumlah Pendapatan		12.894.462	7.330.690
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	12.859.151.335	15.291.597.076
Beban Persediaan	D.3	629.598.000	30.010.000
Beban Barang dan Jasa	D.4	94.245.949.310	150.392.800.304
Beban Pemeliharaan	D.5	2.604.186.541	1.497.538.851
Beban Perjalanan Dinas	D.6	38.169.590.999	74.640.455.502
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.866.607.936	1.751.531.010
Jumlah Beban		150.375.084.121	243.603.932.743
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(150.362.189.659)	(243.596.602.053)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.8	17.784.614	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.9	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	(343.750.765)	120.750.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(325.966.151)	120.750.000
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(150.688.155.810)	(243.475.852.053)
Pos Luar Biasa	D.11		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT -LO		(150.688.155.810)	(243.475.852.053)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2020	2019
EKUITAS AWAL	E.1	27.029.323.367	15.597.360.901
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(150.688.155.810)	(243.475.852.053)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		(113.195.890)
Penyesuaian Nilai Aset	E.41		
Koreksi Nilai Persediaan	E.42		
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43		
Selisih Revaluasi Aset	E.44		
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45		(113.195.890)
Koreksi Lain-Lain	E.46		
Jumlah			(113.195.890)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	148.451.180.729	255.021.010.409
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(2.236.975.081)	11.431.962.466
EKUITAS AKHIR	E.6	24.792.348.286	27.029.323.367

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

Dasar Hukum dan Profil Entitas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh Kepala Sekretariat, dalam melaksanakan tugas Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pelaksanaan perencanaan dan pengawasan internal, administrasi kepegawaian, ketata usahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan keuangan di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mempunyai wewenang:

1. Menyusun dan menetapkan program kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi.
2. Menetapkan tata kerja, sumber daya manusia, mengelola keuangan, dan barang milik negara.

3. Menandatangani perjanjian kerjasama.
4. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota atas nama Sekretaris Jenderal.
5. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan anggaran Panwaslu Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan Visi Bawaslu 2015-2019 **“Terwujudnya Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya Dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”**, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ikut melaksanakan Misi Bawaslu berupa:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri, dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan Kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat, dan transparan;

Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

- (1) Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:
- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan gubernur;
 3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon gubernur;
 4. penetapan calon gubernur;
 5. pelaksanaan kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur;
 - b. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;

- c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penerapan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
 - h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat:
- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
 - b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

2. Profil Sekretariat Bawaslu Provinsi

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi dikepalai oleh Kepala Sekretariat yang bertanggungjawab kepada Bawaslu Provinsi.

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A Terdiri dari 4 Bagian yaitu :

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bagian Pengawasan;
- c. Bagian Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian Sengketa Proses; dan
- d. Bagian hukum, Hubungan masyarakat, Data, dan Informasi.

Bagian Administrasi terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara; dan
- b. Subbagian sumber Daya Manusia dan Umum.

Bagian Pengawasan terdiri atas :

- a. Subbagian Pengawasan dan Akreditasi Pemantau; dan
- b. Subbagian Hubungan Antar Lembaga

Bagian Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian Sengketa Proses terdiri atas :

- a. Subbagian Penanganan Pelanggaran; dan
- b. Subbagian Penyelesaian Sengketa Proses

Bagian hukum, Hubungan masyarakat, Data, dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum; dan
- b. Subbagian Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarhal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemeirntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A. 4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum yang merupakan entitas pelaporan dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya pemotongan anggaran berkaitan dengan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penambahan anggaran berkaitan dengan tahapan pengawasan pemilihan kepala daerah baik dari rupiah murni (RM) maupun hibah dalam negeri (HDN). Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	Anggaran Awal TA 2020	Anggaran Setelah Revisi TA 2020
Belanja		
Belanja Pegawai	30.135.637.000	14.199.217.000
Belanja Barang	43.369.164.000	40.178.756.000
Belanja Modal	14.053.174.000	63.500.000
Jumlah Belanja	87.557.975.000	54.441.473.000
Hibah		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	-	97.375.408.000
Belanja Modal	-	-
Jumlah Hibah	-	97.375.408.000
TOTAL	87.557.975.000	151.816.881.000

*Realisasi
Pendapatan
Rp222.394.366*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp222.394.366,- atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp222.394.366,- dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		%
	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	Rp222.394.3665	-
Jumlah	-	Rp222.394.3665	-

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 84,18 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	222.394.366	120.750.000	84,18
Jumlah	222.394.366	120.750.000	84,18

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp222.394.366 dan Rp120.750.000. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 84,18 dari TA 2019. Tidak ada target penerimaan negara bukan pajak pada tahun 2019. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan PNBPN Lainnya Tahunan TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A .2020	REALISASI T.A 2019	%
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	184.384.600	120.750.000	52,70
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	20.225.152	-	-
	-	-	-
Jumlah	222.394.366	120.750.000	84,18

Adapun bukti-bukti penerimaan Negara bukan pajak dapat dilihat dalam **Lampiran**

Rincian PNBPN Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan adalah berikut:

Sumber Penerimaan Pendapatan PNBPN Pajak Tahunan () TA 2020 Berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

URAIAN	TANGGAL SETOR	NOMOR NTPN	NILAI (Rp)
Pengembalian dari hasil temuan BPK tahun 2018 pada Bawaslu Kabupaten Penungkal Abab lematang Ilir Setoran 1	30 Januari 2020	2297A2G4UK1EKRAE	50.000.000
Pengembalian dari hasil temuan BPK tahun 2018 pada Bawaslu Kabupaten Penungkal Abab lematang Ilir Setoran 2	05 Maret 2020	382E955DE3TQRAI7	6.000.000
Pengembalian dari hasil temuan BPK tahun 2018 pada Bawaslu Kabupaten Penungkal Abab lematang Ilir Setoran 3	04 Juni 2020	E34758N3DEG9VBMB	6.000.000
Pengembalian honor Pokja Sentra Gakkumdu	31 Januari 2020	EAD276U8DOTCLRAT	6.240.000
Pengembalian dari hasil temuan BPK tahun 2018 pada Bawaslu Kabupaten Penungkal Abab lematang Ilir Setoran 4	14 Agustus 2020	A9EF87QLTK44GNQ6	8.542.500
Pengembalian dari hasil temuan BPK tahun 2018 pada Bawaslu Kabupaten Banyuasin	08 September 2020	84D197QLTK6UVJ12	91.607.100
Pengembalian dari hasil temuan BPK tahun 2018 pada Bawaslu Kabupaten Penungkal Abab lematang Ilir Setoran 5	18 November 2020	4ADD548VUA3I5DGU	15.995.000
TOTAL			184.384.600

*Sumber Pendapatan PNBPN Tahunan () TA 2020
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)*

URAIAN	TANGGAL SETOR	NOMOR NTPN	NILAI (Rp)
Jasa Giro Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir tahun 2020	25 Juni 2020	23FB348VU9KVA8QK	5.274
Jasa Giro Kabupaten OKUS tahun 2020	30 Juni 2020	2924661QTUPP5A0Q	12.823.841
Jasa Giro Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir Tahun 2019	17 Februari 2020	9AB2B55DE3R5C6Q7	60.274
Jasa Giro Kabupaten OKUS Tahun 2019	20 Februari 2020	BE44B61QTUDHP6O8	7.037.539
Jasa Giro Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019	21 Februari 2020	594830N9UUV7B6C0	38.356
Jasa Giro kabupaten OKU	5 Maret 2020	63E4A7QLTJL03ERS	194.521
Jasa Giro Bawaslu Provinsi	07 Desember 2020	EA2AF8N3DF26N6C7	65.347
TOTAL			20.159.805

B.2 Belanja

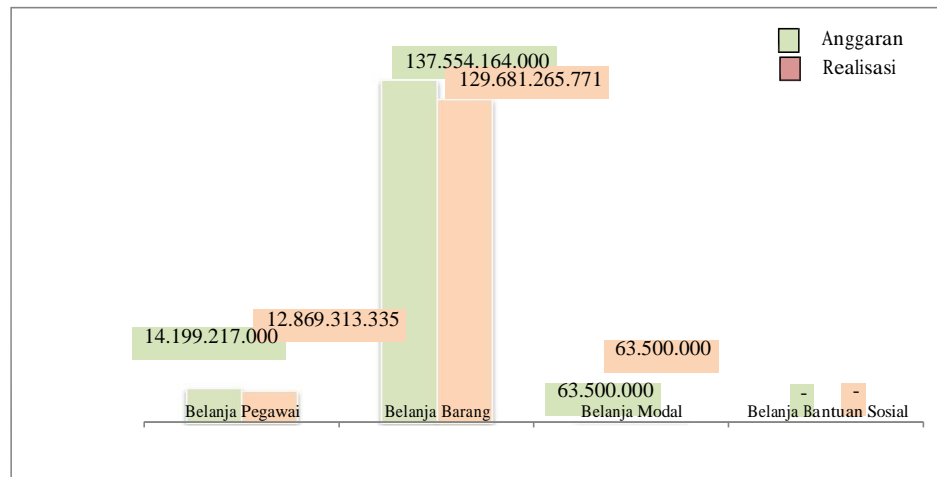
Realisasi Belanja pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp142.614.079.106 atau 93,94 % dari anggaran belanja sebesar Rp.151.816.881.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan () TA 2020

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	14.199.217.000	12.869.313.445	90,63
Belanja Barang	137.554.164.000	129.685.686.771	94,28
Belanja Modal	63.500.000	63.500.000	100,00
Jumlah	151.816.881.000	142.618.500.216	93,94
Pengembalian Belanja		4.421.110	
		142.614.079.106	93,94

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2020



Dibandingkan dengan T.A 2019, Realisasi Belanja T.A 2020 mengalami penurunan sebesar 41,08% Penurunan pada Realiasi pegawai dan Barang disebabkan antara lain :

1. Adanya pengawasan tahapan pemilu legislatif dan presiden pada tahun 2019 sampai dengan Pengawas TPS, sementara pada tahun 2020 tahapan pengawasan pemilihan kepala daerah serentak Tahun

- 2020 sempat ditunda sebagai akibat adanya Pandemi COVID-19;
2. Adanya pembatasan kegiatan operasional perkantoran dan kegiatan yang biasanya dilakukan dengan tatap muka diubah menjadi daring sebagai akibat adanya Pandemi COVID-19;
 3. Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2020 tidak diberikan kepada Pejabat Struktural Eselon Eselon II yaitu Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi;
 4. Tidak dibayarkannya komponen tunjangan kinerja pada pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas PNS pada Tahun 2020;
 5. Penurunan besaran Gaji Ketiga Belas Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi serta THR dan Gaji Ketiga Belas Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota pada Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019;
 6. Penurunan terhadap pengadaan barang yang menghasilkan aset sehubungan dengan adanya pemotongan anggaran sebagai akibat Pandemi COVID-19.

Berikut rincian realisasi belanja TA 2020 dan TA 2019.

1.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan () 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A 2019	%
Belanja Pegawai	12.869.313.335	15.281.435.076	(15,78)
Belanja Barang	129.681.265.771	224.714.819.907	(42,29)
Belanja Modal	63.500.000	2.037.409.000	(96,88)
Jumlah	142.614.079.106	242.033.663.983	(41,08)

Rekapitulasi Belanja Negara sebesar Rp142.614.079.106 merupakan hasil pengurangan dari Realisasi Belanja Bruto sebesar Rp142.618.500.216 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp4.421.110.

Pengembalian belanja sebesar Rp4.421.110 merupakan pengembalian belanja tahun anggaran berjalan yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai sebesar	Rp	110
2. Belanja Barang sebesar	Rp	4.421.000
3. Belanja Modal sebesar	Rp	
Jumlah	Rp	4.421.110

Rincian Pengembalian belanja sebagai berikut :

No	Kode	Uraian	Jumlah
1	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	110
2	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4.325.000
3	524111	Belanja Perjalanan Biasa	96.000
TOTAL			4.421.110

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2020 dan per tanggal 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp12.869.313.335 dan Rp15.281.435.076. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 mengalami penurunan sebesar 15,78 % dari TA 2019. Terdapat Penurunan Pada Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara dikarenakan pada tahun 2020 Komisioner Bawaslu Provinsi tidak mendapatkan THR, dan penurunan gaji ketiga belas bagi ketua, Anggota Bawaslu Provinsi dan kabupaten/Kota serta Pada Tahun 2019 terdapat pembayaran atas kekurangan Uang Kehormatan Bawaslu Kabupaten/kota se Sumatera Selatan selama 4 (empat) bulan, sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 yaitu total senilai Rp.1.381.920.000.

Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI Periode sd 30 Juni.2020	REALISASI Periode s.d 30 Juni 2019	%
Belanja Gaji Pokok PNS	623.125.440	326.253.740	90,99
Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.829	6.586	49,24
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	30.229.480	8.113.360	272,59
Belanja Tunj. Anak PNS	9.451.408	2.787.664	239,04
Belanja Tunj. Struktural PNS	85.710.000	48.700.000	76,00
Belanja Tunj. PPh PNS	85.359.828	118.482.078	(27,96)
Belanja Tunj. Beras PNS	24.552.360	13.252.860	85,26
Belanja Uang Makan PNS	142.770.000	123.436.000	15,66
Belanja Tunjangan Umum PNS	28.350.000	23.725.000	19,49
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	10.480.399.700	12.411.838.400	(15,56)
Belanja Uang Lembur	89.878.200	326.484.500	(72,47)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/kegiatan)	1.269.477.200	1.878.355.400	(32,42)
Jumlah Belanja kotor	12.869.313.445	15.281.435.588	(15,78)
Pengembalian Belanja Pegawai	110	512	(78,52)
Jumlah Belanja	12.869.313.335	15.281.435.076	(15,78)

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.869.313.335 seluruhnya berasal dari sumber dana rupiah murni yang dipergunakan untuk:

1. Pembayaran gaji PNS Bulan Januari s.d. Desember 2020;
2. Pembayaran tunjangan struktural Bulan Januari s.d. Desember 2020;
3. Pembayaran uang makan PNS Bulan Januari s.d. Desember 2020;
4. Pembayaran uang lembur dan uang makan lembur Bulan Januari s.d. Desember 2020;
5. Pembayaran uang kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota Bulan Januari s.d. Desember 2020;
6. Pembayaran tunjangan kinerja PNS Bulan Januari s.d. Desember 2020;
7. Pembayaran THR dan gaji ketiga belas PNS Tahun 2020;
8. Pembayaran THR dan gaji ketiga belas Uang Kehormatan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2020; dan
9. Pembayaran gaji ketiga belas Uang Kehormatan Bawaslu Provinsi Tahun 2020.

Sedangkan pengembalian belanja pegawai merupakan pembulatan gaji PNS sebesar Rp110.

*Realisasi
Belanja
Barang
Rp129.681.265.771*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2020 dan per tanggal 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp129.681.265.771 dan Rp224.714.819.907 Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami penurunan sebesar 42,29% dari Realisasi TA 2019.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan () TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A .2020	REALISASI T.Ai 2019	%
Belanja Barang Operasional	53.568.146.800	68.542.064.032	(21,85)
Belanja Barang Non Operasional	17.085.309.463	36.142.249.206	(52,73)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	629.598.000	30.010.000	1.997,96
Belanja Jasa	17.608.903.068	43.882.364.210	(59,87)
Belanja Pemeliharaan	2.604.186.541	1.497.538.851	73,90
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	38.189.542.899	74.620.599.602	(48,82)
Jumlah Belanja Kotor	129.685.686.771	224.714.825.901	(42,29)
Pengembalian Belanja	4.421.000	5.994	
Jumlah Belanja	129.681.265.771	224.714.819.907	(42,29)

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 sebesar Rp129.681.256.771 berasal dari sumber dana rupiah murni (RM) dan hibah dalam negeri (HDN) masing-masing sebesar Rp37.740.761.760 dan Rp91.940.504.011.

B.4.1 Belanja Barang (RM)

Realisasi Belanja Barang (RM) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp37.740.761.760 dan Rp221.902.431.333

URAIAN	REALISASI T.A .2020	REALISASI T.Ai 2019	% Naik (Turun)
Belanja Barang Operasional	22.654.668.776	68.486.076.032	(66,92)
Belanja Barang Non Operasional	2.323.220.063	35.902.827.632	(93,53)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	629.598.000	30.010.000	1997,96
Belanja Jasa	2.896.496.427	43.390.301.210	(93,32)
Belanja Pemeliharaan	2.095.447.541	1.493.225.851	40,33
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	7.145.751.953	72.599.996.602	(90,16)
Jumlah Belanja Kotor	37.745.182.760	149.302.440.725	(74,72)
Pengembalian Belanja	4.421.000	5.994	73657,09
Jumlah Belanja	37.740.761.760	149.302.434.731	(74,72)

Realisasi Belanja Barang (RM) sebesar Rp37.740.761.760 dipergunakan untuk :

1. Penyusunan rencana kerja (Renja) Bawaslu;
2. Penyusunan rencana kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Bawaslu;
3. Penyusunan Revisi Anggran K/L Tahun 2021 Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
5. Penyusunan Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/kota;
6. Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMNBawaslu Kabupaten/Kota;
7. Pengelolaan BMN;
8. Peningkatan Kapasitas SDM Pengawasan dan Kesekretaraiatan;
9. Sosialisasi Maanajemen SDM Pengawasan Pemilu dan Kesekretaraiatan;
10. Pelaksanaan Tes Seleksi Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Bimtek Peningkatan SDM
12. Monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan program;

13. Raker penyusunan Laporan Kinerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/kota;
14. Pengawasan Pemilu Partisipatif;
15. Pembinaan Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan;
16. Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemoli/pemilihan;
17. Fasilitasi, Koordinasi dan pelaporan Bawaslu Provinsi
18. Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan
19. Kordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan;
20. Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota;
21. Pengembangan Pusat Pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu;
22. Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan penindakan Pelanggaran;
23. Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan;
24. Fasilitasi Sentra Gakkumdu;
25. Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan;
26. Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi;
27. Pengelolaan dan Pelayanan data dan Informasi Publik
28. Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, yang terdiri dari : Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah, Sewa Gedung/Meubliar/Peralatan kantor, Sewa Kendaraan, Kegiatan Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, PTPS, Pelantikan Panwascam, PPL, PTPS, Advokasi dan pendampingan Hukum, rakor/Pelatihan dalam Rangka Pengawasan, Penyelsaian sengketa, Pelangagran, Sentra Gakkumdu, Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan, Koordinas dengan Stakholder, Perjalan Dinas,
29. Operasional dan pemeliharaan Kantor;

Terdapatnya penurunan Realisasi dikarenakan oleh:

- Pada Tahun 2019 terdapat Tahapan Pemilihan Umum sedangkan Tahun 2020 tidak ada sehingga sangat mempengaruhi nilai realiasi pada belanja Keperluan perkantoran, Belanja barang operasional lainnya, belanja bahan dan honor output kegiatan serta belanja barang Non Operasinal Lainnya termasuk biaya listrik, telpon dan air.

- Pada bulan maret sampai dengan Desember 2020 adanya pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan beberapa kegiatan yang direncanakan tidak bisa dilaksanakan, dan Terdapatnya pengurangan pagu,
- Sedangkan pada pemeliharaan gedung terdapat kenaikan dikarenakan terdapat 10 Kabupaten yang Gedungnya merupakan pinjam pakai dari pemerintah daerah sehingga butuh pemeliharaan dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memiliki 2 gedung yang cukup luas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ dengan 2 lantai dimana membutuhkan extra perawatan serta perbaikan.
- Terdapatnya kenaikan pada pemeliharaan kendaraan dan mesin dikarenakan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memiliki Kendaraan Roda 4 sebanyak 12 Unit dan Kendaraan Roda 2 sebanyak 23 Unit yang membutuhkan perawatan berkala ataupun BBM, Dan Juga terdapat pembayaran BBM pada kendaraan Roda 4 pada Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 84 Unit.

Belanja Barang (RM) sebesar Rp37.740.761.760 merupakan hasil pengurangan dari Realisasi Belanja Barang Bruto sebesar Rp37.745.182.760 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp4.421.000. Adapun rincian pengembalian belanja barang sebagai berikut:

Sedangkan pada pengembalian belanja sebesar Rp.4.421.000 adalah pengembalian belanja barang sebagai berikut :

- Pengembalian Belanja (521111) berupa Honor PPNPN bulan Februari 2020 pada Bawaslu Kota Lubuklinggau sebesar Rp. 2.900.000 dengan Nomor NTPN D2AC46U8DP3CCG6B tanggal 31 Maret 2020
- Pengembalian Belanja (521111) berupa Honor PNSD bulan Juni 2020 atas nam Eko Siswanto pada Bawaslu Kota Lubuklinggau sebesar Rp. 1.425.000 dengan Nomor NTPN BFB8B7QLTK132D10 tanggal 13 Juli 2020
- Pengembalian Belanja (524111) berupa sisa ung LS perjalanan Dinas pada Bawaslu provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 81.000 dengan nomor NTPN 21D0F6U8DPU6ICLV tanggal 30 Desember 2020
- Pengembalian Belanja (524111) berupa sisa ung LS perjalanan Dinas pada Bawaslu provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 15.000 dengan Nomor NTPN F4A4A6U8DPU6IC45 tanggal 30 Desember 2020

B.4.2 Belanja Barang (HDN)

Realisasi Belanja Barang (HDN) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp91.940.504.011 dan Rp2.812.388.574.

URAIAN	REALISASI T.A .2020	REALISASI T.Ai 2019	% Naik (Turun)
Belanja Barang Operasional	30.913.478.024	18.662.667	165543,41
Belanja Barang Non Operasional	14.762.089.400	239.421.574	6065,73
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			
Belanja Jasa	14.712.406.641	492.063.000	2889,94
Belanja Pemeliharaan	508.739.000	4.313.000	11695,48
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	31.043.790.946	2.020.603.000	1436,36
Jumlah Belanja Kotor	91.940.504.011	2.812.388.574	3169,13
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	91.940.504.011	2.812.388.574	3169,13

Realisasi belanja barang (HDN) sebesar Rp91.940.504.011 dipergunakan untuk pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada 7 kabupaten di Sumatera Selatan.

Dari Realisasi Belanja Barang (HDN) sebesar Rp91.940.504.011 terdapat realisasi belanja yang digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dengan akun Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19 (521131) senilai Rp 199.505.000 dan akun Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (522192) senilai Rp80.550.000

Belanja Barang dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang bersumber dari hibah dalam negeri dipergunakan untuk pengadaan masker/hand sanitizer, vitamin dan penambah daya tahan tubuh dan biaya Rapid test pada Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

*Realisasi Belanja Modal
Rp63.500.000*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2020 dan Periode 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp63.500.000 dan Rp2.037.409.000. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar 96,88% dibandingkan TA 2019 disebabkan pada tahun 2020 tidak terdapat terdapat pembelian pada peralatan dan mesin.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan () TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI Periode sd 30 Juni.2020	REALISASI Periode s.d 30 Juni 2019	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.500.000	1.812.909.000	(97,32)
Belanja Modal Lainnya	15.000.000	224.500.000	(93,32)
Jumlah Belanja Kotor	63.500.000	2.037.409.000	(96,88)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	63.500.000	2.037.409.000	(96,88)

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp48.500.000

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2020 dan Periode 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp48.500.000 dan Rp1.812.909.000,, mengalami penurunan sebesar 97,32% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2019. Hal ini disebabkan oleh Realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2020 tidak terdapat belanja Modal yang nilainya signifikan karena hanya pembelian berupa termogun.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan () TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA.2020	REALISASI TA 2019	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.500.000	1.812.909.000	(97,32)
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	48.500.000	1.812.909.000	(97,32)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	48.500.000	1.812.909.000	(97,32)

B.5.2 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal 31 Desember 2020 dan Periode 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp15.000.000 dan Rp224.500.000, mengalami penurunan sebesar 93,32% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2019. Hal ini disebabkan oleh Realisasi belanja modal lainnya pada tahun 2020 tidak terdapat belanja Modal yang nilainya signifikan karena hanya pembayaran berupa Jasa Konsultan Penyusunan Cetak Biru Riset dan Kajian Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015-2018 .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan () TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA.2020	REALISASI TA 2019	%
Belanja Modal lainnya	15.000.000	224.500.000	(93,32)
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	15.000.000	224.500.000	(93,32)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	15.000.000	224.500.000	(93,32)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.440.000.000 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

KETERANGAN	JUMLAH
Uang Tunai di Brankas BP	
Uang Tunai di Brankas BPP	
Uang di Rekening Bank BP	
Uang di Rekening Bank BPP	
Kwetansi yang belum di SPM-GU kan	
Jumlah	
Kas Lainnya di BPP (uang LS) yang ada di bank BPP	
Jumlah	

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp11.547.107.415 dan Rp5.501.227.321. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

Keterangan	Per 30 Juni 2020	Per31 Desember 2019
Kas lainnya di Kementrian Negara/lembaga dari Hibah	11.547.107.415	5.487.611.426
Jasa Giro		7.735.895
Honor pokja Sentra gakkumdu		6.240.000
Jumlah	11.547.107.415	5.501.227.321

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya pemotongan anggaran berkaitan dengan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penambahan anggaran berkaitan dengan tahapan pengawasan pemilihan kepala daerah baik dari rupiah murni (RM) maupun hibah dalam negeri (HDN). Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	Anggaran Awal TA 2020	Anggaran Setelah Revisi TA 2020
Belanja		
Belanja Pegawai	30.135.637.000	14.199.217.000
Belanja Barang	43.369.164.000	40.178.756.000
Belanja Modal	14.053.174.000	63.500.000
Jumlah Belanja	87.557.975.000	54.441.473.000
Hibah		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	-	97.375.408.000
Belanja Modal	-	-
Jumlah Hibah	-	97.375.408.000
TOTAL	87.557.975.000	151.816.881.000

*Realisasi
Pendapatan
Rp222.394.366*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp222.394.366,- atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp222.394.366,- dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		%
	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	Rp222.394.3665	-
Jumlah	-	Rp222.394.3665	-

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 84,18 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	222.394.366	120.750.000	84,18
Jumlah	222.394.366	120.750.000	84,18

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp222.394.366 dan Rp120.750.000. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 84,18 dari TA 2019. Tidak ada target penerimaan negara bukan pajak pada tahun 2019. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan PNBPN Lainnya Tahunan TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A .2020	REALISASI T.A 2019	%
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	184.384.600	120.750.000	52,70
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	20.225.152	-	-
	-	-	-
Jumlah	222.394.366	120.750.000	84,18

Adapun bukti-bukti penerimaan Negara bukan pajak dapat dilihat dalam **Lampiran**

Rincian PNBPN Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan adalah berikut:

Sumber Penerimaan Pendapatan PNBPN Pajak Tahunan () TA 2020 Berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

URAIAN	TANGGAL SETOR	NOMOR NTPN	NILAI (Rp)
Pengembalian dari hasil temuan BPK tahun 2018 pada Bawaslu Kabupaten Penungkal Abab lematang Ilir Setoran 1	30 Januari 2020	2297A2G4UK1EKRAE	50.000.000
Pengembalian dari hasil temuan BPK tahun 2018 pada Bawaslu Kabupaten Penungkal Abab lematang Ilir Setoran 2	05 Maret 2020	382E955DE3TQRAI7	6.000.000
Pengembalian dari hasil temuan BPK tahun 2018 pada Bawaslu Kabupaten Penungkal Abab lematang Ilir Setoran 3	04 Juni 2020	E34758N3DEG9VBMB	6.000.000
Pengembalian honor Pokja Sentra Gakkumdu	31 Januari 2020	EAD276U8DOTCLRAT	6.240.000
Pengembalian dari hasil temuan BPK tahun 2018 pada Bawaslu Kabupaten Penungkal Abab lematang Ilir Setoran 4	14 Agustus 2020	A9EF87QLTK44GNQ6	8.542.500
Pengembalian dari hasil temuan BPK tahun 2018 pada Bawaslu Kabupaten Banyuasin	08 September 2020	84D197QLTK6UVJ12	91.607.100
Pengembalian dari hasil temuan BPK tahun 2018 pada Bawaslu Kabupaten Penungkal Abab lematang Ilir Setoran 5	18 November 2020	4ADD548VUA3I5DGU	15.995.000
TOTAL			184.384.600

*Sumber Pendapatan PNBPN Tahunan () TA 2020
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)*

URAIAN	TANGGAL SETOR	NOMOR NTPN	NILAI (Rp)
Jasa Giro Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir tahun 2020	25 Juni 2020	23FB348VU9KVA8QK	5.274
Jasa Giro Kabupaten OKUS tahun 2020	30 Juni 2020	2924661QTUPP5A0Q	12.823.841
Jasa Giro Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir Tahun 2019	17 Februari 2020	9AB2B55DE3R5C6Q7	60.274
Jasa Giro Kabupaten OKUS Tahun 2019	20 Februari 2020	BE44B61QTUDHP6O8	7.037.539
Jasa Giro Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019	21 Februari 2020	594830N9UUV7B6C0	38.356
Jasa Giro kabupaten OKU	5 Maret 2020	63E4A7QLTJL03ERS	194.521
Jasa Giro Bawaslu Provinsi	07 Desember 2020	EA2AF8N3DF26N6C7	65.347
TOTAL			20.159.805

B.2 Belanja

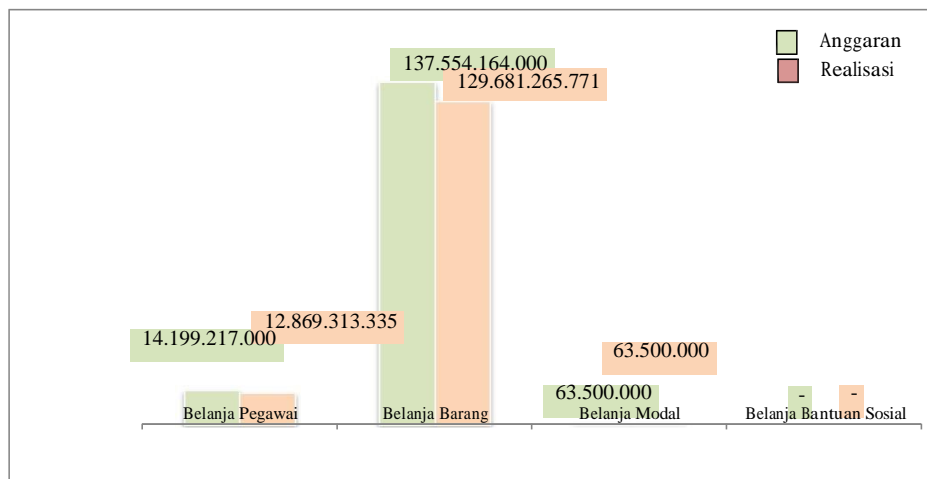
Realisasi Belanja pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp142.614.079.106 atau 93,94 % dari anggaran belanja sebesar Rp.151.816.881.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan () TA 2020

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	14.199.217.000	12.869.313.445	90,63
Belanja Barang	137.554.164.000	129.685.686.771	94,28
Belanja Modal	63.500.000	63.500.000	100,00
Jumlah	151.816.881.000	142.618.500.216	93,94
Pengembalian Belanja		4.421.110	
		142.614.079.106	93,94

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2020



Dibandingkan dengan T.A 2019, Realisasi Belanja T.A 2020 mengalami penurunan sebesar 41,08% Penurunan pada Realiasi pegawai dan Barang disebabkan antara lain :

1. Adanya pengawasan tahapan pemilu legislatif dan presiden pada tahun 2019 sampai dengan Pengawas TPS, sementara pada tahun 2020 tahapan pengawasan pemilihan kepala daerah serentak Tahun

- 2020 sempat ditunda sebagai akibat adanya Pandemi COVID-19;
2. Adanya pembatasan kegiatan operasional perkantoran dan kegiatan yang biasanya dilakukan dengan tatap muka diubah menjadi daring sebagai akibat adanya Pandemi COVID-19;
 3. Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2020 tidak diberikan kepada Pejabat Struktural Eselon Eselon II yaitu Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi;
 4. Tidak dibayarkannya komponen tunjangan kinerja pada pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas PNS pada Tahun 2020;
 5. Penurunan besaran Gaji Ketiga Belas Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi serta THR dan Gaji Ketiga Belas Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota pada Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019;
 6. Penurunan terhadap pengadaan barang yang menghasilkan aset sehubungan dengan adanya pemotongan anggaran sebagai akibat Pandemi COVID-19.

Berikut rincian realisasi belanja TA 2020 dan TA 2019.

1.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan () 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A 2019	%
Belanja Pegawai	12.869.313.335	15.281.435.076	(15,78)
Belanja Barang	129.681.265.771	224.714.819.907	(42,29)
Belanja Modal	63.500.000	2.037.409.000	(96,88)
Jumlah	142.614.079.106	242.033.663.983	(41,08)

Rekapitulasi Belanja Negara sebesar Rp142.614.079.106 merupakan hasil pengurangan dari Realisasi Belanja Bruto sebesar Rp142.618.500.216 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp4.421.110.

Pengembalian belanja sebesar Rp4.421.110 merupakan pengembalian belanja tahun anggaran berjalan yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai sebesar	Rp	110
2. Belanja Barang sebesar	Rp	4.421.000
3. Belanja Modal sebesar	Rp	
Jumlah	Rp	4.421.110

Rincian Pengembalian belanja sebagai berikut :

No	Kode	Uraian	Jumlah
1	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	110
2	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4.325.000
3	524111	Belanja Perjalanan Biasa	96.000
TOTAL			4.421.110

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2020 dan per tanggal 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp12.869.313.335 dan Rp15.281.435.076. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 mengalami penurunan sebesar 15,78 % dari TA 2019. Terdapat Penurunan Pada Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara dikarenakan pada tahun 2020 Komisioner Bawaslu Provinsi tidak mendapatkan THR, dan penurunan gaji ketiga belas bagi ketua, Anggota Bawaslu Provinsi dan kabupaten/Kota serta Pada Tahun 2019 terdapat pembayaran atas kekurangan Uang Kehormatan Bawaslu Kabupaten/kota se Sumatera Selatan selama 4 (empat) bulan, sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 yaitu total senilai Rp.1.381.920.000.

Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI Periode sd 30 Juni.2020	REALISASI Periode s.d 30 Juni 2019	%
Belanja Gaji Pokok PNS	623.125.440	326.253.740	90,99
Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.829	6.586	49,24
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	30.229.480	8.113.360	272,59
Belanja Tunj. Anak PNS	9.451.408	2.787.664	239,04
Belanja Tunj. Struktural PNS	85.710.000	48.700.000	76,00
Belanja Tunj. PPh PNS	85.359.828	118.482.078	(27,96)
Belanja Tunj. Beras PNS	24.552.360	13.252.860	85,26
Belanja Uang Makan PNS	142.770.000	123.436.000	15,66
Belanja Tunjangan Umum PNS	28.350.000	23.725.000	19,49
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	10.480.399.700	12.411.838.400	(15,56)
Belanja Uang Lembur	89.878.200	326.484.500	(72,47)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/kegiatan)	1.269.477.200	1.878.355.400	(32,42)
Jumlah Belanja kotor	12.869.313.445	15.281.435.588	(15,78)
Pengembalian Belanja Pegawai	110	512	(78,52)
Jumlah Belanja	12.869.313.335	15.281.435.076	(15,78)

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.869.313.335 seluruhnya berasal dari sumber dana rupiah murni yang dipergunakan untuk:

1. Pembayaran gaji PNS Bulan Januari s.d. Desember 2020;
2. Pembayaran tunjangan struktural Bulan Januari s.d. Desember 2020;
3. Pembayaran uang makan PNS Bulan Januari s.d. Desember 2020;
4. Pembayaran uang lembur dan uang makan lembur Bulan Januari s.d. Desember 2020;
5. Pembayaran uang kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota Bulan Januari s.d. Desember 2020;
6. Pembayaran tunjangan kinerja PNS Bulan Januari s.d. Desember 2020;
7. Pembayaran THR dan gaji ketiga belas PNS Tahun 2020;
8. Pembayaran THR dan gaji ketiga belas Uang Kehormatan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2020; dan
9. Pembayaran gaji ketiga belas Uang Kehormatan Bawaslu Provinsi Tahun 2020.

Sedangkan pengembalian belanja pegawai merupakan pembulatan gaji PNS sebesar Rp110.

*Realisasi
Belanja
Barang
Rp129.681.265.771*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2020 dan per tanggal 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp129.681.265.771 dan Rp224.714.819.907 Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami penurunan sebesar 42,29% dari Realisasi TA 2019.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan () TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A .2020	REALISASI T.Ai 2019	%
Belanja Barang Operasional	53.568.146.800	68.542.064.032	(21,85)
Belanja Barang Non Operasional	17.085.309.463	36.142.249.206	(52,73)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	629.598.000	30.010.000	1.997,96
Belanja Jasa	17.608.903.068	43.882.364.210	(59,87)
Belanja Pemeliharaan	2.604.186.541	1.497.538.851	73,90
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	38.189.542.899	74.620.599.602	(48,82)
Jumlah Belanja Kotor	129.685.686.771	224.714.825.901	(42,29)
Pengembalian Belanja	4.421.000	5.994	
Jumlah Belanja	129.681.265.771	224.714.819.907	(42,29)

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 sebesar Rp129.681.256.771 berasal dari sumber dana rupiah murni (RM) dan hibah dalam negeri (HDN) masing-masing sebesar Rp37.740.761.760 dan Rp91.940.504.011.

B.4.1 Belanja Barang (RM)

Realisasi Belanja Barang (RM) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp37.740.761.760 dan Rp221.902.431.333

URAIAN	REALISASI T.A .2020	REALISASI T.Ai 2019	% Naik (Turun)
Belanja Barang Operasional	22.654.668.776	68.486.076.032	(66,92)
Belanja Barang Non Operasional	2.323.220.063	35.902.827.632	(93,53)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	629.598.000	30.010.000	1997,96
Belanja Jasa	2.896.496.427	43.390.301.210	(93,32)
Belanja Pemeliharaan	2.095.447.541	1.493.225.851	40,33
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	7.145.751.953	72.599.996.602	(90,16)
Jumlah Belanja Kotor	37.745.182.760	149.302.440.725	(74,72)
Pengembalian Belanja	4.421.000	5.994	73657,09
Jumlah Belanja	37.740.761.760	149.302.434.731	(74,72)

Realisasi Belanja Barang (RM) sebesar Rp37.740.761.760 dipergunakan untuk :

1. Penyusunan rencana kerja (Renja) Bawaslu;
2. Penyusunan rencana kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Bawaslu;
3. Penyusunan Revisi Anggran K/L Tahun 2021 Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
5. Penyusunan Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/kota;
6. Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMNBawaslu Kabupaten/Kota;
7. Pengelolaan BMN;
8. Peningkatan Kapasitas SDM Pengawasan dan Kesekretaraiatan;
9. Sosialisasi Maanajemen SDM Pengawasan Pemilu dan Kesekretaraiatan;
10. Pelaksanaan Tes Seleksi Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Bimtek Peningkatan SDM
12. Monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan program;

13. Raker penyusunan Laporan Kinerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/kota;
14. Pengawasan Pemilu Partisipatif;
15. Pembinaan Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan;
16. Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemoli/pemilihan;
17. Fasilitasi, Koordinasi dan pelaporan Bawaslu Provinsi
18. Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan
19. Kordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan;
20. Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota;
21. Pengembangan Pusat Pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu;
22. Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan penindakan Pelanggaran;
23. Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan;
24. Fasilitasi Sentra Gakkumdu;
25. Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan;
26. Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi;
27. Pengelolaan dan Pelayanan data dan Informasi Publik
28. Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, yang terdiri dari : Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah, Sewa Gedung/Meubliar/Peralatan kantor, Sewa Kendaraan, Kegiatan Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, PTPS, Pelantikan Panwascam, PPL, PTPS, Advokasi dan pendampingan Hukum, rakor/Pelatihan dalam Rangka Pengawasan, Penyelsaian sengketa, Pelangagran, Sentra Gakkumdu, Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan, Koordinas dengan Stakholder, Perjalan Dinas,
29. Operasional dan pemeliharaan Kantor;

Terdapatnya penurunan Realisasi dikarenakan oleh:

- Pada Tahun 2019 terdapat Tahapan Pemilihan Umum sedangkan Tahun 2020 tidak ada sehingga sangat mempengaruhi nilai realiasi pada belanja Keperluan perkantoran, Belanja barang operasional lainnya, belanja bahan dan honor output kegiatan serta belanja barang Non Operasinal Lainnya termasuk biaya listrik, telpon dan air.

- Pada bulan maret sampai dengan Desember 2020 adanya pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan beberapa kegiatan yang direncanakan tidak bisa dilaksanakan, dan Terdapatnya pengurangan pagu,
- Sedangkan pada pemeliharaan gedung terdapat kenaikan dikarenakan terdapat 10 Kabupaten yang Gedungnya merupakan pinjam pakai dari pemerintah daerah sehingga butuh pemeliharaan dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memiliki 2 gedung yang cukup luas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ dengan 2 lantai dimana membutuhkan extra perawatan serta perbaikan.
- Terdapatnya kenaikan pada pemeliharaan kendaraan dan mesin dikarenakan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memiliki Kendaraan Roda 4 sebanyak 12 Unit dan Kendaraan Roda 2 sebanyak 23 Unit yang membutuhkan perawatan berkala ataupun BBM, Dan Juga terdapat pembayaran BBM pada kendaraan Roda 4 pada Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 84 Unit.

Belanja Barang (RM) sebesar Rp37.740.761.760 merupakan hasil pengurangan dari Realisasi Belanja Barang Bruto sebesar Rp37.745.182.760 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp4.421.000. Adapun rincian pengembalian belanja barang sebagai berikut:

Sedangkan pada pengembalian belanja sebesar Rp.4.421.000 adalah pengembalian belanja barang sebagai berikut :

- Pengembalian Belanja (521111) berupa Honor PPNPN bulan Februari 2020 pada Bawaslu Kota Lubuklinggau sebesar Rp. 2.900.000 dengan Nomor NTPN D2AC46U8DP3CCG6B tanggal 31 Maret 2020
- Pengembalian Belanja (521111) berupa Honor PNSD bulan Juni 2020 atas nam Eko Siswanto pada Bawaslu Kota Lubuklinggau sebesar Rp. 1.425.000 dengan Nomor NTPN BFB8B7QLTK132D10 tanggal 13 Juli 2020
- Pengembalian Belanja (524111) berupa sisa ung LS perjalanan Dinas pada Bawaslu provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 81.000 dengan nomor NTPN 21D0F6U8DPU6ICLV tanggal 30 Desember 2020
- Pengembalian Belanja (524111) berupa sisa ung LS perjalanan Dinas pada Bawaslu provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 15.000 dengan Nomor NTPN F4A4A6U8DPU6IC45 tanggal 30 Desember 2020

B.4.2 Belanja Barang (HDN)

Realisasi Belanja Barang (HDN) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp91.940.504.011 dan Rp2.812.388.574.

URAIAN	REALISASI T.A .2020	REALISASI T.Ai 2019	% Naik (Turun)
Belanja Barang Operasional	30.913.478.024	18.662.667	165543,41
Belanja Barang Non Operasional	14.762.089.400	239.421.574	6065,73
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			
Belanja Jasa	14.712.406.641	492.063.000	2889,94
Belanja Pemeliharaan	508.739.000	4.313.000	11695,48
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	31.043.790.946	2.020.603.000	1436,36
Jumlah Belanja Kotor	91.940.504.011	2.812.388.574	3169,13
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	91.940.504.011	2.812.388.574	3169,13

Realisasi belanja barang (HDN) sebesar Rp91.940.504.011 dipergunakan untuk pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada 7 kabupaten di Sumatera Selatan.

Dari Realisasi Belanja Barang (HDN) sebesar Rp91.940.504.011 terdapat realisasi belanja yang digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dengan akun Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19 (521131) senilai Rp 199.505.000 dan akun Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (522192) senilai Rp80.550.000

Belanja Barang dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang bersumber dari hibah dalam negeri dipergunakan untuk pengadaan masker/hand sanitizer, vitamin dan penambah daya tahan tubuh dan biaya Rapid test pada Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

*Realisasi Belanja Modal
Rp63.500.000*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2020 dan Periode 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp63.500.000 dan Rp2.037.409.000. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar 96,88% dibandingkan TA 2019 disebabkan pada tahun 2020 tidak terdapat terdapat pembelian pada peralatan dan mesin.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan () TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI Periode sd 30 Juni.2020	REALISASI Periode s.d 30 Juni 2019	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.500.000	1.812.909.000	(97,32)
Belanja Modal Lainnya	15.000.000	224.500.000	(93,32)
Jumlah Belanja Kotor	63.500.000	2.037.409.000	(96,88)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	63.500.000	2.037.409.000	(96,88)

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp48.500.000

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2020 dan Periode 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp48.500.000 dan Rp1.812.909.000,, mengalami penurunan sebesar 97,32% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2019. Hal ini disebabkan oleh Realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2020 tidak terdapat belanja Modal yang nilainya signifikan karena hanya pembelian berupa termogun.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan () TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA.2020	REALISASI TA 2019	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.500.000	1.812.909.000	(97,32)
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	48.500.000	1.812.909.000	(97,32)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	48.500.000	1.812.909.000	(97,32)

B.5.2 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal 31 Desember 2020 dan Periode 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp15.000.000 dan Rp224.500.000, mengalami penurunan sebesar 93,32% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2019. Hal ini disebabkan oleh Realisasi belanja modal lainnya pada tahun 2020 tidak terdapat belanja Modal yang nilainya signifikan karena hanya pembayaran berupa Jasa Konsultan Penyusunan Cetak Biru Riset dan Kajian Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015-2018 .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan () TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA.2020	REALISASI TA 2019	%
Belanja Modal lainnya	15.000.000	224.500.000	(93,32)
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	15.000.000	224.500.000	(93,32)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	15.000.000	224.500.000	(93,32)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya pemotongan anggaran berkaitan dengan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penambahan anggaran berkaitan dengan tahapan pengawasan pemilihan kepala daerah baik dari rupiah murni (RM) maupun hibah dalam negeri (HDN). Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	Anggaran Awal TA 2020	Anggaran Setelah Revisi TA 2020
Belanja		
Belanja Pegawai	30.135.637.000	14.199.217.000
Belanja Barang	43.369.164.000	40.178.756.000
Belanja Modal	14.053.174.000	63.500.000
Jumlah Belanja	87.557.975.000	54.441.473.000
Hibah		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	-	97.375.408.000
Belanja Modal	-	-
Jumlah Hibah	-	97.375.408.000
TOTAL	87.557.975.000	151.816.881.000

*Realisasi
Pendapatan
Rp222.394.366*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp222.394.366,- atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp222.394.366,- dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		%
	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	Rp222.394.3665	-
Jumlah	-	Rp222.394.3665	-

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 84,18 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	222.394.366	120.750.000	84,18
Jumlah	222.394.366	120.750.000	84,18

Realisasi
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak
Rp222.394.366

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp222.394.366 dan Rp120.750.000. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 84,18 dari TA 2019 Tidak ada target penerimaan negara bukan pajak pada tahun 2019. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan PNBP Lainnya Tahunan TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A .2020	REALISASI T.A 2019	%
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	184.384.600	120.750.000	52,70
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	20.225.152	-	-
	-	-	-
Jumlah	222.394.366	120.750.000	84,18

B.2 Belanja

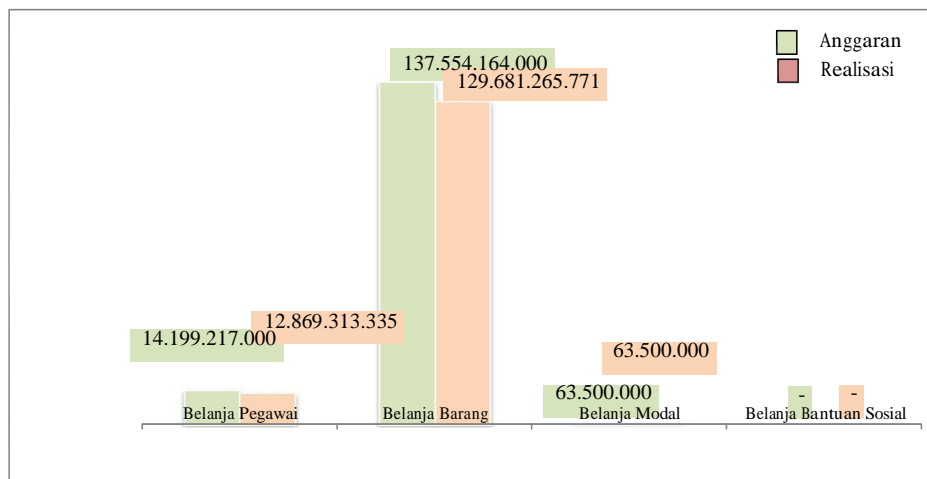
Realisasi Belanja pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp142.614.079.106 atau 93,94 % dari anggaran belanja sebesar Rp.151.816.881.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan () TA 2020

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	14.199.217.000	12.869.313.445	90,63
Belanja Barang	137.554.164.000	129.685.686.771	94,28
Belanja Modal	63.500.000	63.500.000	100,00
Jumlah	151.816.881.000	142.618.500.216	93,94
Pengembalian Belanja		4.421.110	
		142.614.079.106	93,94

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2020



Dibandingkan dengan T.A 2019, Realisasi Belanja T.A 2020 mengalami penurunan sebesar 41,08% Penurunan pada Realiasi pegawai dan Barang disebabkan antara lain :

1. Adanya pengawasan tahapan pemilu legislatif dan presiden pada tahun 2019 sampai dengan Pengawas TPS, sementara pada tahun 2020 tahapan pengawasan pemilihan kepala daerah serentak Tahun

- 2020 sempat ditunda sebagai akibat adanya Pandemi COVID-19;
2. Adanya pembatasan kegiatan operasional perkantoran dan kegiatan yang biasanya dilakukan dengan tatap muka diubah menjadi daring sebagai akibat adanya Pandemi COVID-19;
 3. Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2020 tidak diberikan kepada Pejabat Struktural Eselon Eselon II yaitu Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi;
 4. Tidak dibayarkannya komponen tunjangan kinerja pada pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas PNS pada Tahun 2020;
 5. Penurunan besaran Gaji Ketiga Belas Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi serta THR dan Gaji Ketiga Belas Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota pada Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019;
 6. Penurunan terhadap pengadaan barang yang menghasilkan aset sehubungan dengan adanya pemotongan anggaran sebagai akibat Pandemi COVID-19.

Berikut rincian realisasi belanja TA 2020 dan TA 2019.

1.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan () 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A 2019	%
Belanja Pegawai	12.869.313.335	15.281.435.076	(15,78)
Belanja Barang	129.681.265.771	224.714.819.907	(42,29)
Belanja Modal	63.500.000	2.037.409.000	(96,88)
Jumlah	142.614.079.106	242.033.663.983	(41,08)

Rekapitulasi Belanja Negara sebesar Rp142.614.079.106 merupakan hasil pengurangan dari Realisasi Belanja Bruto sebesar Rp142.618.500.216 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp4.421.110.

Pengembalian belanja sebesar Rp4.421.110 merupakan pengembalian belanja tahun anggaran berjalan yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai sebesar	Rp	110
2. Belanja Barang sebesar	Rp	4.421.000
3. Belanja Modal sebesar	Rp	
Jumlah	Rp	4.421.110

Rincian Pengembalian belanja sebagai berikut :

No	Kode	Uraian	Jumlah
1	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	110
2	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4.325.000
3	524111	Belanja Perjalanan Biasa	96.000
TOTAL			4.421.110

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2020 dan per tanggal 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp12.869.313.335 dan Rp15.281.435.076. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 mengalami penurunan sebesar 15,78 % dari TA 2019. Terdapat Penurunan Pada Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara dikarenakan pada tahun 2020 Komisioner Bawaslu Provinsi tidak mendapatkan THR, dan penurunan gaji ketiga belas bagi ketua, Anggota Bawaslu Provinsi dan kabupaten/Kota serta Pada Tahun 2019 terdapat pembayaran atas kekurangan Uang Kehormatan Bawaslu Kabupaten/kota se Sumatera Selatan selama 4 (empat) bulan, sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 yaitu total senilai Rp.1.381.920.000.

Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI Periode sd 30 Juni.2020	REALISASI Periode s.d 30 Juni 2019	%
Belanja Gaji Pokok PNS	623.125.440	326.253.740	90,99
Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.829	6.586	49,24
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	30.229.480	8.113.360	272,59
Belanja Tunj. Anak PNS	9.451.408	2.787.664	239,04
Belanja Tunj. Struktural PNS	85.710.000	48.700.000	76,00
Belanja Tunj. PPh PNS	85.359.828	118.482.078	(27,96)
Belanja Tunj. Beras PNS	24.552.360	13.252.860	85,26
Belanja Uang Makan PNS	142.770.000	123.436.000	15,66
Belanja Tunjangan Umum PNS	28.350.000	23.725.000	19,49
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	10.480.399.700	12.411.838.400	(15,56)
Belanja Uang Lembur	89.878.200	326.484.500	(72,47)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/kegiatan)	1.269.477.200	1.878.355.400	(32,42)
Jumlah Belanja kotor	12.869.313.445	15.281.435.588	(15,78)
Pengembalian Belanja Pegawai	110	512	(78,52)
Jumlah Belanja	12.869.313.335	15.281.435.076	(15,78)

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.869.313.335 seluruhnya berasal dari sumber dana rupiah murni yang dipergunakan untuk:

1. Pembayaran gaji PNS Bulan Januari s.d. Desember 2020;
2. Pembayaran tunjangan struktural Bulan Januari s.d. Desember 2020;
3. Pembayaran uang makan PNS Bulan Januari s.d. Desember 2020;
4. Pembayaran uang lembur dan uang makan lembur Bulan Januari s.d. Desember 2020;
5. Pembayaran uang kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota Bulan Januari s.d. Desember 2020;
6. Pembayaran tunjangan kinerja PNS Bulan Januari s.d. Desember 2020;
7. Pembayaran THR dan gaji ketiga belas PNS Tahun 2020;
8. Pembayaran THR dan gaji ketiga belas Uang Kehormatan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2020; dan
9. Pembayaran gaji ketiga belas Uang Kehormatan Bawaslu Provinsi Tahun 2020.

Sedangkan pengembalian belanja pegawai merupakan pembulatan gaji PNS sebesar Rp110.

*Realisasi
Belanja
Barang
Rp129.681.265.771*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2020 dan per tanggal 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp129.681.265.771 dan Rp224.714.819.907 Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami penurunan sebesar 42,29% dari Realisasi TA 2019.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan () TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A .2020	REALISASI T.Ai 2019	%
Belanja Barang Operasional	53.568.146.800	68.542.064.032	(21,85)
Belanja Barang Non Operasional	17.085.309.463	36.142.249.206	(52,73)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	629.598.000	30.010.000	1.997,96
Belanja Jasa	17.608.903.068	43.882.364.210	(59,87)
Belanja Pemeliharaan	2.604.186.541	1.497.538.851	73,90
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	38.189.542.899	74.620.599.602	(48,82)
Jumlah Belanja Kotor	129.685.686.771	224.714.825.901	(42,29)
Pengembalian Belanja	4.421.000	5.994	
Jumlah Belanja	129.681.265.771	224.714.819.907	(42,29)

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 sebesar Rp129.681.256.771 berasal dari sumber dana rupiah murni (RM) dan hibah dalam negeri (HDN) masing-masing sebesar Rp37.740.761.760 dan Rp91.940.504.011.

B.4.1 Belanja Barang (RM)

Realisasi Belanja Barang (RM) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp37.740.761.760 dan Rp221.902.431.333

URAIAN	REALISASI T.A .2020	REALISASI T.Ai 2019	% Naik (Turun)
Belanja Barang Operasional	22.654.668.776	68.486.076.032	(66,92)
Belanja Barang Non Operasional	2.323.220.063	35.902.827.632	(93,53)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	629.598.000	30.010.000	1997,96
Belanja Jasa	2.896.496.427	43.390.301.210	(93,32)
Belanja Pemeliharaan	2.095.447.541	1.493.225.851	40,33
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	7.145.751.953	72.599.996.602	(90,16)
Jumlah Belanja Kotor	37.745.182.760	149.302.440.725	(74,72)
Pengembalian Belanja	4.421.000	5.994	73657,09
Jumlah Belanja	37.740.761.760	149.302.434.731	(74,72)

Realisasi Belanja Barang (RM) sebesar Rp37.740.761.760 dipergunakan untuk :

1. Penyusunan rencana kerja (Renja) Bawaslu;
2. Penyusunan rencana kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Bawaslu;
3. Penyusunan Revisi Anggran K/L Tahun 2021 Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
5. Penyusunan Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/kota;
6. Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMNBawaslu Kabupaten/Kota;
7. Pengelolaan BMN;
8. Peningkatan Kapasitas SDM Pengawasan dan Kesekretaraiatan;
9. Sosialisasi Maanajemen SDM Pengawasan Pemilu dan Kesekretaraiatan;
10. Pelaksanaan Tes Seleksi Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Bimtek Peningkatan SDM
12. Monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan program;

13. Raker penyusunan Laporan Kinerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/kota;
14. Pengawasan Pemilu Partisipatif;
15. Pembinaan Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan;
16. Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemoli/pemilihan;
17. Fasilitasi, Koordinasi dan pelaporan Bawaslu Provinsi
18. Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan
19. Kordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan;
20. Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota;
21. Pengembangan Pusat Pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu;
22. Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan penindakan Pelanggaran;
23. Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan;
24. Fasilitasi Sentra Gakkumdu;
25. Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan;
26. Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi;
27. Pengelolaan dan Pelayanan data dan Informasi Publik
28. Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, yang terdiri dari : Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah, Sewa Gedung/Meubliar/Peralatan kantor, Sewa Kendaraan, Kegiatan Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, PTPS, Pelantikan Panwascam, PPL, PTPS, Advokasi dan pendampingan Hukum, rakor/Pelatihan dalam Rangka Pengawasan, Penyelsaian sengketa, Pelangagran, Sentra Gakkumdu, Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan, Koordinas dengan Stakholder, Perjalan Dinas,
29. Operasional dan pemeliharaan Kantor;

Terdapatnya penurunan Realisasi dikarenakan oleh:

- Pada Tahun 2019 terdapat Tahapan Pemilihan Umum sedangkan Tahun 2020 tidak ada sehingga sangat mempengaruhi nilai realiasi pada belanja Keperluan perkantoran, Belanja barang operasional lainnya, belanja bahan dan honor output kegiatan serta belanja barang Non Operasinal Lainnya termasuk biaya listrik, telpon dan air.

- Pada bulan maret sampai dengan Desember 2020 adanya pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan beberapa kegiatan yang direncanakan tidak bisa dilaksanakan, dan Terdapatnya pengurangan pagu,
- Sedangkan pada pemeliharaan gedung terdapat kenaikan dikarenakan terdapat 10 Kabupaten yang Gedungnya merupakan pinjam pakai dari pemerintah daerah sehingga butuh pemeliharaan dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memiliki 2 gedung yang cukup luas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ dengan 2 lantai dimana membutuhkan extra perawatan serta perbaikan.
- Terdapatnya kenaikan pada pemeliharaan kendaraan dan mesin dikarenakan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memiliki Kendaraan Roda 4 sebanyak 12 Unit dan Kendaraan Roda 2 sebanyak 23 Unit yang membutuhkan perawatan berkala ataupun BBM, Dan Juga terdapat pembayaran BBM pada kendaraan Roda 4 pada Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 84 Unit.

Belanja Barang (RM) sebesar Rp37.740.761.760 merupakan hasil pengurangan dari Realisasi Belanja Barang Bruto sebesar Rp37.745.182.760 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp4.421.000. Adapun rincian pengembalian belanja barang sebagai berikut:

Sedangkan pada pengembalian belanja sebesar Rp.4.421.000 adalah pengembalian belanja barang sebagai berikut :

- Pengembalian Belanja (521111) berupa Honor PPNPN bulan Februari 2020 pada Bawaslu Kota Lubuklinggau sebesar Rp. 2.900.000 dengan Nomor NTPN D2AC46U8DP3CCG6B tanggal 31 Maret 2020
- Pengembalian Belanja (521111) berupa Honor PNSD bulan Juni 2020 atas nam Eko Siswanto pada Bawaslu Kota Lubuklinggau sebesar Rp. 1.425.000 dengan Nomor NTPN BFB8B7QLTK132D10 tanggal 13 Juli 2020
- Pengembalian Belanja (524111) berupa sisa ung LS perjalanan Dinas pada Bawaslu provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 81.000 dengan nomor NTPN 21D0F6U8DPU6ICLV tanggal 30 Desember 2020
- Pengembalian Belanja (524111) berupa sisa ung LS perjalanan Dinas pada Bawaslu provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 15.000 dengan Nomor NTPN F4A4A6U8DPU6IC45 tanggal 30 Desember 2020

B.4.2 Belanja Barang (HDN)

Realisasi Belanja Barang (HDN) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp91.940.504.011 dan Rp2.812.388.574.

URAIAN	REALISASI T.A .2020	REALISASI T.Ai 2019	% Naik (Turun)
Belanja Barang Operasional	30.913.478.024	18.662.667	165543,41
Belanja Barang Non Operasional	14.762.089.400	239.421.574	6065,73
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			
Belanja Jasa	14.712.406.641	492.063.000	2889,94
Belanja Pemeliharaan	508.739.000	4.313.000	11695,48
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	31.043.790.946	2.020.603.000	1436,36
Jumlah Belanja Kotor	91.940.504.011	2.812.388.574	3169,13
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	91.940.504.011	2.812.388.574	3169,13

Realisasi belanja barang (HDN) sebesar Rp91.940.504.011 dipergunakan untuk pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada 7 kabupaten di Sumatera Selatan.

Dari Realisasi Belanja Barang (HDN) sebesar Rp91.940.504.011 terdapat realisasi belanja yang digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dengan akun Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19 (521131) senilai Rp 199.505.000 dan akun Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (522192) senilai Rp80.550.000

Belanja Barang dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang bersumber dari hibah dalam negeri dipergunakan untuk pengadaan masker/hand sanitizer, vitamin dan penambah daya tahan tubuh dan biaya Rapid test pada Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

*Realisasi Belanja Modal
Rp63.500.000*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2020 dan Periode 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp63.500.000 dan Rp2.037.409.000. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar 96,88% dibandingkan TA 2019 disebabkan pada tahun 2020 tidak terdapat terdapat pembelian pada peralatan dan mesin.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan () TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI Periode sd 30 Juni.2020	REALISASI Periode s.d 30 Juni 2019	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.500.000	1.812.909.000	(97,32)
Belanja Modal Lainnya	15.000.000	224.500.000	(93,32)
Jumlah Belanja Kotor	63.500.000	2.037.409.000	(96,88)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	63.500.000	2.037.409.000	(96,88)

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp48.500.000

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2020 dan Periode 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp48.500.000 dan Rp1.812.909.000,, mengalami penurunan sebesar 97,32% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2019. Hal ini disebabkan oleh Realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2020 tidak terdapat belanja Modal yang nilainya signifikan karena hanya pembelian berupa termogun.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan () TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA.2020	REALISASI TA 2019	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.500.000	1.812.909.000	(97,32)
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	48.500.000	1.812.909.000	(97,32)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	48.500.000	1.812.909.000	(97,32)

B.5.2 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal 31 Desember 2020 dan Periode 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp15.000.000 dan Rp224.500.000, mengalami penurunan sebesar 93,32% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2019. Hal ini disebabkan oleh Realisasi belanja modal lainnya pada tahun 2020 tidak terdapat belanja Modal yang nilainya signifikan karena hanya pembayaran berupa Jasa Konsultan Penyusunan Cetak Biru Riset dan Kajian Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015-2018 .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan () TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA.2020	REALISASI TA 2019	%
Belanja Modal lainnya	15.000.000	224.500.000	(93,32)
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	15.000.000	224.500.000	(93,32)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	15.000.000	224.500.000	(93,32)

Saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/lembaga dari Hibah per 31 Desember 2020 tersajikan sama dengan saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/lembaga dari Hibah per 31 Desember 2019 sebesar Rp.5.487.611.426,-. Hal ini disebabkan terdapat belanja hibah pada tahun 2020 (periode 31 Desember 2020) belum dilakukan pengesahan. Namun dana hibah yang telah di SP2HL pada tahun 2020 sebesar Rp tersebut sekarang telah terbelanjakan sebesar Rp.91.940.504.011,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI NPHD	SP2HL TAHUN 2019	SP2HL TAHUN 2020	SISA DANA /KAS LAINNYA PER 31 DES 2020
1.	Kab.Ogan Ilir	19.350.000.000	347.900.000	18.079.014.721	923.085.279
2.	Kab.Penukal Abab Lematang Ilir	16.000.000.000	350.000.000	11.761.920.205	3.888.079.795
3.	Kab.Musi Rawas	17.250.000.000	250.000.000	13.947.419.157	3.052.580.843
4	Kab.Musi Rawas Utara	9.200.000.000	200.000.000	8.505.456.400	494.543.600
5	Kab.Ogan Komering Ulu	13.500.000.000	500.000.000	12.110.318.030	889.681.970
6	Kab.Ogan Komering Ulu Selatan	15.000.000.000	1.164.488.574	12.873.337.298	962.174.128
7	Kab.Ogan Komering Ulu Timur	16.000.000.000		14.663.038.200	1.336.961.800
JUMLAH		106.300.000.000	2.812.388.574	91.940.504.011	11.547.107.415

Belanja Dibayar
Dimuka (prepaid)
Rp27.500.000

C.3 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp27.500.000 dan Rp6.275.585.067. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2019
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	27.500.000	6.275.585.067
	-	-
Jumlah	27.500.000	6.275.585.067

Penjelasan Belanja Dibayar Dimuka sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Nilai Sewa Gedung kantor untuk bulan Juli Tahun 2020 sd Juni 2021 pada Bawaslu Kota Lubuklinggau	55.000.000
2.	Sewa Gedung kantor untuk bulan Juli Tahun 2020 sd Desember 2021 pada Bawaslu Kota Lubuklinggau	(27.500.000)
3.	Sewa Gedung kantor untuk bulan Januari Tahun 2021 sd Juni 2021 pada Bawaslu Kota Lubuklinggau	27.500.000

Sesuai dengan Nomor surat Perjanjian Sewa Gedung Kantor Bawaslu Kota Lubuklinggau 014/SPS/Bawaslu-Prov.14/VII/2020 Tanggal 08 Juli 2020 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp55.000.000,-dengan Nomor BAST 001/BA/BAWASLU-Prov.14/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020

Persediaan Rp0

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp.823.004.365. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Semester I TA 2020 dan 2019

Jenis	PER 31 Desember 2020	PER 31 Desember 2019
Barang Konsumsi	0	823.004.365
Jumlah	0	823.004.365

Persediaan tidak terdapat sisa dikarenakan buku saksi parpol Pemilu tahun 2019 yang terdapat di Kabupaten/kota dengan nilai Rp.823.004.365 telah dilakukan penghapusan dan pelepasan dengan Nomor Risalah Lelang 760/14/2020 Tanggal 10 November 2020.

Tanah Rp187.858.000

C.5 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.187.858.000,- dan Rp.187.858.000,-. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	187.858.000
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
	-
Mutasi kurang :	
	-
Saldo per 30 Juni 2020	187.858.000

Nilai tanah Sebesar Rp.187.858.000,- merupakan aset tanah Bawaslu Prov. Sumsel yang berlokasi di Jalan OPI Raya Jakabaring Kota Palembang seluas 3.884 m²

Aset tersebut merupakan Hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dengan Naskah Perjanjian Hibah Barang (NPHD) dengan Nomor Perjanjian 016/HIBAH/BPKSD/2017 dan 100/Bawaslu/SJ/PL.03.02/III/2017 dan Berita acara serah terima hibah Nomor 012/BA/BPKAD/2017 pada tanggal 27 Maret 2017.

C.6 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp10.375.425.300,- dan Rp.10.025.776.300,- Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	10.025.776.300
Mutasi tambah:	
Pembelian Belanja Modal Semester I	48.500.000
Perolehan Lainnya	301.149.000
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2020	10.375.425.300
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(5.520.573.464)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	4.854.851.836

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp.349.649.000,- merupakan realisasi belanja modal per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 48.500.000,- dan Perolehan Lainnya senilai Rp.301.149.000,-

Perolehan BMN Tahun 2020 berasal dari Belanja Modal berupa :

No	Jenis Barang	Jumlah Barang/unit	Nilai Satuan (Rp)	Nilai Total (Rp)
1.	Termogan/Alat pengukur suhu	3	2.000.000	6.000.000
2.	Termogan/Alat pengukur suhu	17	2.500.000	42.500.000
TOTAL				48.500.000

Perolehan BMN Tahun 2020 berasal dari Perolehan Lainnya berupa :

No	Jenis Barang	Jumlah Barang/unit	Nilai Satuan (Rp)	Nilai Total (Rp)	Keterangan
1.	Mini Bus	1	127.400.000	127.400.000	BAST Nomor 621/BMI/PLG/II/2020 Dan 107/BAST/SS/SET/PL.00/VI/2020 Tanggal 24 Juni 2020
2.	Lep Top	1	3.750.000	3.750.000	BAST Nomor 632/BMI/PLG/VI/2020 Dan 109/ /SS/SET/PL.03.03/VI/2020 Tanggal 29 Juni 2020
3.	PC UNIT	17	8.815.000	149.855.000	BAST Nomor 786/BMI/PLG/IX/2020 Dan 156/SS/SET/PL.00/IX/2020 Tanggal 24 September 2020
4.	Printer	7	2.102.000	14.714.000	BAST Nomor 786/BMI/PLG/IX/2020 Dan 156/SS/SET/PL.00/IX/2020 Tanggal 24 September 2020
5.	Printer	3	1.810.000	5.430.000	BAST Nomor 786/BMI/PLG/IX/2020 Dan 156/SS/SET/PL.00/IX/2020 Tanggal 24 September 2020
				301.149.000	

C.7 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp8.577.169.000 dan Rp. 8.577.169.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	8.577.169.000
Mutasi tambah:	
Hibah (Masuk)	
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2020	8.577.169.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(487.067.270)
Nilai Buku per 30 Juni 2020	8.090.101.730

Nilai Gedung dan Bangunan Sebesar Rp8.577.169.000 seluas 1.509 m² merupakan aset Bawaslu Prov. Sumsel yang berlokasi di Jalan OPI Raya Jakabaring Kota Palembang berasal dari Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

- a. Terima Dari pemda Tahun 2017 seluas 429 m² dengan Nilai Rp.1.940.294.000,- sesuai dengan NPHD 016/HIBAH/BPKSD/2017 dan dengan Nomor 100/Bawaslu/SJ/PL.03.02/III/2017 dan Berita acara serah terima hibah Nomor 012/BA/BPKAD/2017 pada tanggal 27 Maret 2017
- b. Terima Dari pemda Tahun 2018 1 seluas 080 m² dengan Nilai 6.636.875.000,- sesuai dengan Nomor Berita Acara Serah Terima (BAST) 056.1/BAST/SET/SS/PL.03.02/VIII/2018 Tanggal 31 Agustus 2018.

C.8 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp.8.000.000,- dan Rp.8.000.000,- Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan merupakan serah terima dari Bawaslu RI berupa Instalasi Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	8.000.000
Mutasi tambah:	-
Mutasi Kurang:	-
Saldo per	8.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d.	(6.133.334)
Nilai Buku per	1.866.666

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tidak ada mutasi tambah Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama periode tahunan

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tidak ada mutasi kurang Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama periode tahunan

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp6.014.040.735 dan Rp4.215.007.799. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester I Tahun 2020

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	10.375.425.300	(5.520.573.464)	4.854.851.836
2	Gedung dan Bangunan	8.577.169.000	(487.067.270)	8.090.101.730
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.000.000	(6.400.001)	1.599.999
Akumulasi Penyusutan		18.960.594.300	(6.014.040.735)	12.946.553.565

C.10 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp.242.500.000,- dan Rp.242.500.000,- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan berupa Software dan lisensi.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 31 Desember 2019	242.500.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2020	242.500.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2020	(109.962.500)
Nilai Buku per 30 Juni 2020	132.537.500

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

- Terdapat pengadaan software pada 17 Bawaslu Kabupaten/kota sebesar Rp.195.500.000,- dengan nilai masing-masing per kabupaten seharga Rp.11.500.000,-
- Terdapat pengadaan software pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.29.000.000,-

C.11 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp109.962.500 dan Rp42.387.500,- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapsitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Sofeware	240.500.000	(109.062.500)	131.437.500
Lisensi	2.000.000	(900.000)	1.100.000
-	-	-	-
Total	242.500.000	(109.962.500)	132.537.500

*Utang kepada Pihak
Ketiga Rp49.208.194*

C.12 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp49.208.194 dan Rp.354.441.387. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Uraian	REALISASI PER 30 JUNI 2020	REALISASI PER 31 DESEMBER 2019
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	49.208.194	354.441.387-
	-	-
Total	49.208.194	354.441.387-

Penjelasan lebih lanjut untuk hutang kepada Pihak Ketiga yang belum dibayar kan sebagai berikut :

- a. Biaya tagihan pemakaian listrik bulan Desember 2020 pada Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi di Sumatera Selatan sebesar Rp. 28.154.536
- b. Biaya tagihan pemakaian jasa Internet bulan Desember 2020 pada Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi di Sumatera Selatan sebesar Rp.15.368.828
- c. Biaya tagihan pemakaian AIR/PDAM bulan Desember 2020 pada Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi di Sumatera Selatan sebesar Rp. 5.684.830

Rincian Utang Pihak Ketiga atas Jasa Penggunaan Listrik, internet dan air pada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota yaitu :

NO	Untuk Pembayaran	Kode Akun	Jumlah
1	Beban Tagihan listrik Desember OKI	522111	1.285.460
2	Beban Tagihan listrik Desember Muara Enim	522111	803.364
3	Beban Tagihan listrik Desember OKUT	522111	1.650.318
4	Beban Tagihan listrik Desember Mura	522111	3.567.696
5	Beban Tagihan listrik Desember Lahat	522111	872.335
6	Tagihan listrik Desember Muratara	522111	2.311.926
7	Tagihan listrik Desember Lubuk Linggau	522111	418.422
8	Tagihan Listrik Desember EMPAT LAWANG	522111	772.374
9	Tagihan Listrik Desember Provinsi	522111	16.472.641
JUMLAH TOTAL			28.154.536

NO	Untuk Pembayaran	Kode Akun	Jumlah
1	Beban Langganan Internet Desember OKI	521111	624.275
2	Beban Langganan Internet Desember Muara Enim	521111	992.500
3	Beban Langganan Internet Desember OKUT	521111	656.500
4	Beban Langganan Internet Desember Prabumulih	521111	356.700
5	Beban Langganan Internet Desember Ogan Ilir	521111	911.240
6	Beban Langganan Internet Desember Mura	521111	643.500
7	Langganan Internet Desember Lahat	521111	1.465.300
8	Langganan Internet Desember Muratara	521111	456.750
9	Langganan Internet Desember Lubuk Linggau	521111	679.000
10	Tagihan Internet Desember Pali	521111	545.000
11	Langganan Internet Desember OKUS	521111	988.000
12	Tagihan Internet Desember pagar alam	521111	652.250
13	Tagihan Internet Desember Banyuasin	521111	393.500
14	Tagihan INTERNET Desember OKU	521111	473.679
15	Tagihan INTERNET Desember EMPAT LAWANG	521111	574.634
16	Tagihan Internet Desember Provinsi	521111	4.956.000
JUMLAH TOTAL			15.368.828

NO	Untuk Pembayaran	Kode Akun	Jumlah
1	tagihan Air Desember Palembang	522113	245.420
2	tagihan Air Desember MUBA	522113	285.000
3	Tagihan Air Desember OKU	522113	77.500
4	Tagihan Air Desember Provinsi	522113	5.076.910
JUMLAH TOTAL			5.684.830

Hibah Yang
Belum Disahkan
Rp11.547.107.415

C.13 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp11.547.107.415 dan Rp98.000.000.000. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan/ diterima sampai dengan per 31 Desember 2020

Uraian	Jumlah (Rp)
Kab.Ogan Ilir	923.085.279
Kab.Penukal Abab Lematang Ilir	3.888.079.795
Kab.Musi Rawas	3.052.580.843
Kab.Musi Rawas Utara	494.543.600
Kab.Ogan Komering Ulu	889.681.970
Kab.Ogan Komering Ulu Selatan	962.174.128
Jumlah	11.547.107.415

C.14 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja, dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

C.15 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp24.792.348.286. dan Rp27.029.323.367 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp12.894.462

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Total Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.12.894.462,- dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	TA.2020	TA 2019	%
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa)	12.894.462	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	-	-
Jumlah	12.894.462	-	-

Pendapatan Negara Bukan Pajak di peroleh dari :

- Jasa Giro Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir tahun 2020 Sebesar Rp. 5,274 dengan nomor NTPN 23FB348VU9KVA8QK yang di setor pada tanggal 25 Juni 2020
- Jasa Giro Kabupaten OKUS tahun 2020 sebesar Rp. 12,823,841 dengan nomor NTPN 2924661QTUPP5A0Q yang di setor pada tanggal 30 Juni 2020
- Jasa Giro Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Sebesar Rp.65.347 dengan nomor NTPN EA2AF8N3DF26N6C7 yang di setor pada tanggal 07 Desember 2020

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp12.859.151.335 dan Rp15.291.597.076

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai pada Tahun 2020 sebesar 15,91 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh Pada Tahun Anggaran 2020, realisasi belanja pegawai tidak terdapat pembagian THR pada Komisioner Bawaslu Provinsi dan tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja ke 14 untuk para PNS tidak dapat direalisasikan karena dampak penghematan anggaran dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19. Rincian Beban Pegawai Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Gaji Pokok PNS	623.125.44	326.253.74	90,99
Beban Pembulatan Gaji PNS	9.719	6.074	60,01
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	30.229.48	8.113.360	272,59
Beban Tunj. Anak PNS	9.451.408	2.787.664	239,04
Beban Tunj. Struktural PNS	85.710.00	48.700.00	76,00
Beban Tunj. PPh PNS	85.359.82	118.482.07	(27,96)
Beban Tunj. Beras PNS	24.552.36	13.252.86	85,26
Beban Uang Makan PNS	132.608.00	133.598.00	(0,74)
Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka	-	-	-
Beban Tunjangan Umum PNS	28.350.00	23.725.00	19,49
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	10.480.399.70	12.411.838.40	(15,56)
Beban Uang Lembur	89.878.20	326.484.50	(72,47)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.269.477.200	1.878.355.400	(32,42)
Jumlah	12.859.151.33	15.291.597.07	(15,91)

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp19.848.600

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.629.598.000 dan Rp.30.010.000

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1.997,96 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh terdapat bantuan penanganan Covid-19. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Semester I TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A.2019	%
Beban Persediaan konsumsi	629.598.000	30.010.000	1.997,96
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	629.598.000,00	30.010.000	1.997,96

Beban Barang dan Jasa
Rp94.245.949.310

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp94.245.949.310 dan Rp150.392.800.304

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 37,33 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh Pada Tahun 2019, terdapat Tahapan Pemilu Tahun 2019. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	%
Beban Keperluan Perkantoran	48.117.348.928	65.468.068.596	(26,50)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15.919.500	-	-
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1.584.039.000	1.216.304.000	30,23
Beban Barang Operasional Lainnya	684.680.600	1.857.685.442	(63,14)
Beban Bahan	11.446.234.463	30.829.124.641	(62,87)
Beban Honor Outt Kegiatan	5.608.500.000	2.569.080.000	118,31
Beban Barang Non Operasional Lainnya	30.575.000	1.914.760.200	(98,40)
Beban Langganan Listrik	820.594.184	1.237.855.787	(33,71)
Beban Langganan Telepon	23.088.097	82.839.247	(72,13)
Beban Langganan Air	343.967.561	472.473.058	(27,20)
Beban Jasa Konsultan	590.000.000	300.000.000	96,67
Beban Sewa	16.762.967.767	34.054.148.333	(50,78)
Beban Jasa Profesi	2.882.595.000	8.849.961.000	(67,43)
Beban Jasa Lainnya	981.989.110	1.491.000.000	(34,14)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	49.500.000	(100,00)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	56.100.000	-	-
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3.121.102.600	-	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID - 19	1.176.247.500	-	-
Jumlah	94.245.949.310	50.392.800.304	(37,33)

Terdapat Penurunan Beban Barang dan Jasa dikarenakan adanya pemotongan anggaran dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19.

Adapun Belanja Barang dan Jasa dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 adalah digunakan untuk :

1. Pengadaan masker kain untuk Bawaslu Kabupaten/kota, Panwascam, PKD, dan PTPS yang melaksanakan Pilkada Tahun 2020,
2. Pengadaan hand sanitizer untuk Bawaslu Kabupaten/kota, Panwascam, PKD, dan PTPS yang melaksanakan Pilkada Tahun 2020,
3. Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh berupa multivitamin untuk Bawaslu Kabupaten/kota, Panwascam, PKD, dan PTPS yang melaksanakan Pilkada Tahun 2020,
4. Pengadaan Sarung Tangan Plastik untuk Bawaslu Kabupaten/kota, Panwascam, PKD, dan PTPS yang melaksanakan Pilkada Tahun 2020,
5. Pengadaan baju Hazmat Protective Suit untuk Bawaslu Kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2020,
6. Biaya Komunikasi / Paket data untuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, Panwascam, PKD,
7. Pengadaan Belanja Jasa berupa Rapid Tes untuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, Panwascam, PKD, dan PTPS yang melaksanakan Pilkada Tahun 2020.

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.604.186.541 dan Rp1.497.538.851

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 73,90 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh Terdapat beban pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada Bawaslu Provinsi dan 17 kabupaten/Kota berupa pemeliharaan kendaraan dan BBM. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TA.2020	TA2019	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	464.022.954	676.563.000	(31,41)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.140.163.587	820.975.851	160,69
Jumlah	2.604.186.541	1.497.538.851	73,90

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp38.169.590.999 dan Rp74.640.455.502

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 48,86 persen disebabkan oleh Tahun 2019 terdapat Tahapan Pemilu sedangkan tahun 2020 tidak serta terdapatnya pandemi Covid-19 sehingga Perjalanan dinas intensitasnya di minimumkan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Perjalanan Biasa	1.711.583.350	3.852.503.627	(55,57)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	75.884.335	17.913.386.906	(99,58)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	611.969.600	27.380.797.000	(97,76)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	207.885.000		-
Jumlah	2.607.322.285,00	49.146.687.533	(94,69)

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp1.866.607.936

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.866.607.936 dan Rp1.751.531.010.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut

:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI TA .2020	REALISASI TA 2019	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.626.956.222	1.543.566.796	5,40
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	171.543.380	171.543.380	-
Beban Penyusutan Jaringan	533.334	533.334	-
Beban Amortisasi Software	67.375.000	35.687.500	88,79
Beban Amortisasi Lisensi	200.000	200.000	-
	-	-	-
Jumah Penyusutan	1.866.607.936	1.751.531.010	6,57
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	1.866.607.936	1.751.531.010	6,57

Surplus (Defisit) dari Penjualan aset Non Lancar Rp17.784.614

D.8 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) dari Penjualan Aset Non Lancar untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp17.784.614 dan Rp.0,-

*Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited)
TA 2020 dan 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI TA.2020	REALISASI TA 2019	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	17.784.614		-
		-	-
Jumlah	17.784.614	-	-

11

Penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp17.784.614 diperoleh dari hasil penjualan/lelang buku saku parpol yang dilakukan pada bulan November 2020.

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp343.750.765

D.9 Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-343.750.765 dan Rp120.750.000.

Rincian Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited)
TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI TA.2020	REALISASI TA 2019	%
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	178.144.600	120.750.000	47,53
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	301.149.000	-	
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	(823.044.365)	-	-
Jumlah	(343.750.765)	120.750.000	(384,68)

Penerimaan kembali Belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp.178.144.600 diperoleh dari pengembalian Bawaslu Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir dan Bawaslu Kabupaten Banyuasin atas temuan BPK tahun 2018.

Sedangkan Perolehan Aset lainnya sebesar Rp.301.149.000 diperoleh dari Pemberian Bank Muamalat.

Untuk Persediaan Rusak/Usang sebesar Rp.823.044.365 telah dilakukan penghapusan melalui lelang.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp27.029.323.367

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.27.029.323.367,- dan Rp.15.597.360.901,-

Defisit LO Rp.
150.688.155.810

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.150.688.155.810 dan Rp.243.475.852.053 Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Transaksi Antar Entitas
Rp148.451.180.729

E.3 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.148.451.180.729 dan Rp.255.021.010.409 Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2020

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	50.673.575.095
Diterima dari Entitas Lain	(222.394.366)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	98.000.000.000
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	-
	-
Jumlah	148.451.180.729

E.3.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020, DKEL sebesar Rp 50.673.575.095 sedangkan DDEL

sebesar Rp 222.394.366

E.3.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0 terdiri dari :

E.3.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2020

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		-

Ekuitas Akhir
Rp24.792.348.286

E.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.24.792.348.286 dan Rp.27.029.323.367

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

- Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terdapat pergantian Kepala Sekretariat pada tanggal 24 Januari 2020 atas dasar Surat Tugas No 0150/SJ/I/2020 Kepada Pakerti Luhur Luluk, Ak., MM sebagai Plt. Kasek Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
- Pada tanggal 1 Oktober 2020 berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat Jenderal Bawaslu Nomor 131/BAWASLU/SJ/KP.04.00/X/2020 Tentang Pemberhentian Pejabat Administrasi Dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dimana Kasek Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan adalah Rahmat Fauzi Mursalin, SH., M.Si
- Pada tahun anggaran 2020 terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bawaslu sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019, dimana Bawaslu Sumsel termasuk dalam Bawaslu Provinsi kelas A yang terdiri atas 4(empat) bagian telah dilantik 4 orang Kabag pada bulan Februari 2020 dan perubahan jumlah Kepala Sub Bagian yang semula 3(tiga) orang menjadi 6(enam) orang, akan tetapi baru terisi 1(satu) orang yang dilantik bulan Maret 2020.
- Terdapat 7 Kali Revisi DIPA yaitu :
 - o DIPA pertama terima dana sebesar Rp.87.557.975.000
 - o DIPA Revisi 1 Sebesar Rp.46.177.738.000 pada tanggal 28 April 2020 terdapat pemotongan anggaran dikarenakan pandemi Covid-19
 - o DIPA Revisi 2 sebesar Rp. Rp46.177.738.000 pada tanggal 18 Juni 2020 dikarenakan terdapat perubahan beberapa akun dimana menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi.
 - o DIPA Revisi 3 sebesar Rp. Rp49.580.203.000 pada tanggal 27 Juni 2020 dikarenakan ada penambahan dana untuk penanganan COVID-19.
 - o DIPA Revisi 4 sebesar Rp. Rp54.441.473.000 pada tanggal 14 September 2020 dikarenakan ada penambahan dana untuk penanganan COVID-19

- DIPA Revisi 5 sebesar Rp. Rp54.441.473.000 pada tanggal 03 November 2020 dikarenakan terdapat perubahan beberapa akun dimana menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi.
- DIPA Revisi 6 sebesar Rp. Rp151.816.881.000 pada tanggal 16 Desember 2020 dikarenakan memasukkan dana Hibah Pilkada Tahun 2020 sebesar Rp.97.375.408.000.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Rekening Pemerintah yang masih digunakan dalam kegiatan operasional di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan 30 September 2020 adalah sebanyak 24, yang terdiri dari:
 - a. Rekening Rupiah Murni Satker Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sejumlah 1 rekening
 - b. Rekening Rupiah Murni Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan sejumlah 17 rekening
 - c. Rekening terkait dengan hibah pada Bawaslu Kabupaten di Sumatera Selatan sejumlah 7 rekening

- Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang menunjuk Sdr. Pakerti Luhur,A.K.,MM.

- Terdapat beberapa kali perubahan pada PPK, PPSPM dan BP pada Tahun 2020 yaitu :
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen
 1. Pakerti Luhur,AK.,MM (Nomor SK Penunjukan PPK 002/SK/SS/SET/KP.00/I/2020) masa penugasan sebagai PPK pada 01 Januari 2020 s.d 8 Maret 2020
 2. Anadi,SP.,M.Si (Nomor SK Penunjukan PPK 115/SK/SS/SET/KU.00/111/2020) masa penugasan sebagai PPK pada 09 Maret 2020 s.d 4 Oktober 2020
 3. Indri Heryanti,SH.,MH (Nomor SK Penunjukan PPK 076/SK/SS/SET/KP.00/X/2020) masa penugasan sebagai PPK pada 05 Oktober s.d 31 Desember 2020

- b. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
 - 1. Tri Effendi,SH (Nomor SK Penunjukan PPK 004/SK/SS/SET/KP.00/I/2020) masa penugasan sebagai PPSPM pada 01 Januari 2020 s.d 09 Juli 2020
 - 2. Indri Heryanti,SH.,MH (Nomor SK Penunjukan PPK 065/SK/SS/SET/KP.00/VII/2020) masa penugasan sebagai PPSPM pada 10 Juli 2020 s.d 04 Oktober 2020
 - 3. Pakerti Luhur,AK.,MM (Nomor SK Penunjukan PPK 077/SK/SS/SET/KP.00/X/2020) masa penugasan sebagai PPSPM pada 05 Oktober 2020 s.d 31 Desember 2020

- c. Bendahara pengeluaran
 - 1. Indri Heryanti,SH.,MH (Nomor SK Penunjukan PPK 161/SK/SS/SET/KP.00/XI/2019) masa penugasan sebagai BP pada 01 Januari 2020 s.d 08 Maret 2020
 - 2. Theo Prima Bhakti,SE (Nomor SK Penunjukan PPK 116/SK/SS/SET/KP.00/III/2020) masa penugasan sebagai BP pada 09 maret 2020 s.d 06 Juli 2020
 - 3. Rahmi Syaulia,A.Md (Nomor SK Penunjukan PPK 180/SK/SS/SET/KU.00/VII/2020) pada 07 Juli 2020 s.d 31 Desember 2020

- Terdapat Dana Hibah Pilkada Tahun 2020 yang masuk untuk Tahap lanjutan sebesar Rp.98.000.000.000,- dengan uraian sebagai berikut :
 - 1. Bawaslu Kabupaten Musi Rawas menerima Pendapatan dari Pemda Tahun 2020 Sebesar Rp.17.000.000.000,-
 - 2. Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir menerima Pendapatan dari Pemda Tahun 2020 Sebesar Rp19.000.000.000,-
 - 3. Bawaslu Kabupaten Muratara menerima Pendapatan dari Pemda Tahun 2020 Sebesar Rp.9.000.000.000,-
 - 4. Bawaslu Kabupaten OKU menerima Pendapatan dari Pemda Tahun 2020 Sebesar Rp.13.000.000.000,-
 - 5. Bawaslu Kabupaten OKU Timur menerima Pendapatan dari Pemda Tahun 2020 Sebesar Rp.16.000.000.000,-
 - 6. Bawaslu Kabupaten OKU Selatan menerima Pendapatan dari Pemda Tahun 2020 Sebesar Rp.9.000.000.000,-
 - 7. Bawaslu Kabupaten Penungkal Abab lematang Ilir menerima Pendapatan dari Pemda Tahun 2020 Sebesar Rp.15.000.000.000,-

- Pada Tahun 2020 terhadap dana hibah Pilkada telah dilakukan SP2HL dengan Rincian sebagai Berikut :
 1. Bawaslu Kabupaten Musi Rawas dana hibah yang di SP2HL Tahun 2020 Sebesar Rp.13.947.419.157
 2. Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir dana hibah yang di SP2HL Tahun 2020 Sebesar Rp.18.079.014.721
 3. Bawaslu Kabupaten Muratara dana hibah yang di SP2HL Tahun 2020 Sebesar Rp.8.505.456.400
 4. Bawaslu Kabupaten OKU dana hibah yang di SP2HL Tahun 2020 Sebesar Rp.12.110.318.030
 5. Bawaslu Kabupaten OKU Timur dana hibah yang di SP2HL Tahun 2020 Sebesar Rp.14.663.038.200
 6. Bawaslu Kabupaten OKU Selatan dana hibah yang di SP2HL Tahun 2020 Sebesar Rp.12.873.337.298
 7. Bawaslu Kabupaten Penungkal Abab lematang Ilir dana hibah yang di SP2HL Tahun 2020 Sebesar Rp.11.761.920.205

- Sehubungan dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, secara umum Badan Pengawas Pemilu mengalami dampak langsung dari sisi anggaran dimana anggaran gaji, uang makan, uang lembur (alokasi 51 di Bawaslu Kabupaten/Kota) dikurangi, belanja operasional perkantoran maupun kegiatan-kegiatan juga dikurangi sehingga pemotongan anggaran di Bawaslu sebesar 46%. Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden tersebut Bawaslu melakukan langkah-langkah percepatan revisi anggaran dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, diantaranya Refocusing Anggaran Kegiatan (dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan penanganan COVID-19 di masing-masing Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota), refocusing anggaran dilakukan melalui revisi anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2020, refocusing anggaran dilakukan secara tepat, sederhana, dan akuntabel serta tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi utama Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya mempengaruhi anggaran namun mempengaruhi kegiatan di Bawaslu, semua kegiatan dikantor dilaksanakan sesuai protokol kesehatan terutama dengan penerapan social dan physical distancing sehingga berakibat adanya keterbatasan koordinasi secara

langsung. Namun penyelesaian kegiatan penyusunan laporan keuangan dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan melakukan koordinasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi informasi.

- Pada Tahun 2020 telah dilakukan penjualan/Lelang pada buku saku parpol yang menjadi beban persediaan (rusak/usang) dengan Nomor Risalah Lelang 760/14/2020 pada tanggal 10 Nopember 2020 dengan nilai penjualan sebesar Rp.17.784.614
- Berdasarkan hasil penilaian penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tidak ada temuan, baik kelemahan material, kelemahan signifikan maupun kelemahan yang berdampak rendah. Penilaian dilakukan terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi. Berdasarkan penilaian tersebut disimpulkan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah efektif.

Pejabat Pengelola Keuangan per 31 Desember 2020 yaitu :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Pakerti Luhur, Ak., MM
Pejabat Pembuat Komitmen	: Indri Heriyanti, SH, MH
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Pakerti Luhur, Ak., MM
Bendahara Pengeluaran	: Rahmi Syaulia, A. Md

Palembang, Desember 2020
Kuasa Pengguna Anggaran

Pakerti Luhur, AK, MM
NIP. 197504151995021001



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-158592/WPB.06/KP.014/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN (686250) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara PALEMBANG, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Desember 2020.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	151,816,881,000	151,816,881,000	0
2	Belanja	142,618,500,216	142,618,500,216	0
3	Pengembalian Belanja	-4,421,110	-4,421,110	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	222,394,366	222,394,366	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	11,547,107,415	11,547,107,415	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Ahmad Bustomi
NIP.196312251990111001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
KPA

Pakerti Luhur, Ak., MM.
NIP.197504151995021001

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN (686250)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2020 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 151,816,881,000

SAI/SA-BUN : 151,816,881,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 142,618,500,216

SAI/SA-BUN : 142,618,500,216

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -4,421,110

SAI/SA-BUN : -4,421,110

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 222,394,366

SAI/SA-BUN : 222,394,366

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 11,547,107,415

SAI/SA-BUN : 11,547,107,415

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

13. Langkah-langkah Perbaiki kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Ahmad Bustomi
NIP.196312251990111001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
KPA

Pakerti Luhur, Ak., MM.
NIP.197504151995021001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah